

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan kantin sekolah dapat menjadi salah satu alternatif dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program.

Bagian dari Efisiensi

KEPALA BGN UNGKAP KANTIN SEKOLAH BISA JADI ALTERNATIF DAPUR MBG



KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang

Jakarta, HanTer - Nanik menjelaskan, pemanfaatan kantin sekolah dapat diterapkan terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit sehingga tidak memerlukan pembangunan dapur baru. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat diterapkan di daerah terpencil maupun wilayah terdapat, terluar, dan tertinggal (3T).

Dia menyontohkan terdapat sekolah di Lombok Barat yang hanya memiliki 119 murid sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.

"Misalnya di Lombok. Di Lombok itu, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan, gitu," kata Nanik saat memberikan pernyataan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Selain kantin sekolah, BGN juga mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, seperti dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti

di Raja Ampat, itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T," ucapnya.

Nanik mengatakan, berbagai alternatif tersebut menjadi bagian dari langkah efisiensi agar pelaksanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini bagian efisiensi supaya tidak tadi, menggu-

nakan semuanya APBN," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Nanik turut merespons terkait informasi mengenai sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut menghentikan layanan karena dana belum dicairkan.

Momentum Evaluasi Total

PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau saya sih memandang (BGN) memang harus melakukan evaluasi. Istilahnya itu kepemimpinannya lah, personalia di pimpinannya itu," kata Trubus di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan masih

diwarnai berbagai persoalan struktural, mulai dari kualitas makanan hingga masalah tata kelola anggaran. Trubus menyoroti adanya ketimpangan antara target kuantitas dan realisasi kualitas di lapangan.

Mulai dari masalah keracunan makanan, menu yang tidak sesuai, hingga akurasi data penerima manfaat menjadi catatan kritis yang harus segera dibenahi oleh pimpinan BGN yang baru.

Trubus sekaligus mendorong agar data penerima program MBG dievaluasi kembali agar lebih tepat sasaran.

■ Sammy

Nanik mengatakan, sebagian informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dia menjelaskan, pencairan dana telah dilakukan secara bertahap sejak Jumat pekan lalu dan berlanjut pada Senin ini. Menurut laporan yang diterima BGN, sejumlah SPPG juga telah

menerima pencairan dana pada hari tersebut.

"Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau enggak salah kami dapat laporan Rp5 T (triliun) ya yang dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja," ujarnya.

■ Sammy

Mensesneg Serap Aspirasi BEM SI Jateng Masukan ke Pemerintah



PRASETYO HADI

Jakarta, HanTer - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerima atas adanya aspirasi yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jawa Tengah mengenai masalah perekonomian, sebagai masukan bagi pemerintah.

Dia menyampaikan pemerintah dalam beberapa hari terakhir betul-betul

bekerja sama dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan perekonomian tanah air.

"Kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain," kata Prasetyo usai mengikuti rapat koordinasi tata kelola ekspor di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia pun tak menampik bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini bukan perkara mudah, karena dipengaruhi berbagai faktor.

Selain itu, menurut dia, tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu.

Namun, dia memastikan pemerintah telah ber-

upaya menangani masalah itu, salah satunya dengan memberi kepastian bagi para pelaku usaha mengenai kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang disampaikan pada Senin hari ini.

"Yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik (BEM SI) ini kan semangatnya untuk kita semua, bagaimana untuk tata kelola ekspor di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Sebelumnya, BEM SI di Jawa Tengah meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki permasalahan nilai tukar rupiah agar bisa kembali menguat. Seperti diketahui, kini nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS hingga mencapai Rp18 ribu per dolar AS.

■ Sammy

Wamenaker Nilai Sejumlah Regulasi Ketenagakerjaan Perlu Direvisi

Jakarta, HanTer - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai sejumlah regulasi di sektor ketenagakerjaan perlu direvisi untuk mendukung kesejahteraan para pekerja dan memajukan industri dalam negeri.

"Ada Undang-Undang UAP yang masih dipakai di negara kita. Itu undang-undang Belanda tahun 1930," kata Afriansyah dalam Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Undang-Undang UAP Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie 1930) adalah landasan hukum peninggalan era

kolonial yang masih berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia, memuat pedoman Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) serta perizinan untuk berbagai jenis ketel dan pesawat uap di Indonesia.

Menurut dia, sudah saatnya peraturan era kolonial itu diperbaharui disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini yakni sebagaimana yang telah dilakukan DPR RI dengan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) meski harus menunggu 20 tahun lamanya.

"Sementara perubahan zaman sudah sedemi-

kian besar, dan UAP ini masih dipergunakan baik di sektor mineral maupun di perusahaan industri yang lain. Ini penting dan mudah-mudahan Undang-Undang UAP Tahun 1930 ini bisa direvisi barengan," ujarnya.

Kemudian, dia juga menilai Undang-Undang K3 yang masih memakai Undang-Undang Nomor 1970 yakni salah satu sanksi yang dimuat bagi industri yang melakukan pelanggaran hanya dikenakan denda Rp100 juta atau kurungan tiga bulan sudah tidak relevan.

"Ya ini mungkin harus diubah," katanya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pimpinan serikat pekerja lainnya, Afriansyah menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor industri dan ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait (DPR, Polri, dan kementerian/ lembaga terkait) untuk memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi.

■ Sammy

Mendagri Tak Ingin Ada Opsi Pemberhentian PPPK

Jakarta, HanTer - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pihaknya tak menginginkan opsi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai honorer dalam menyikapi dinamika kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) dan honorer di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

"Kita tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai," kata Tito di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Tito juga menegaskan tenaga kerja yang sudah direkrut jangan diberhentikan karena pemerintah tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga me-

maparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) mulai tahun 2027. Dari sisi belanja, ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak melakukan rekrutmen baru maupun pemberhentian pegawai yang sudah ada.

"(Kepala daerah) harus tegas tidak ada perekrutan honorer baru," ujar Mendagri.

Kemudian, dari sisi pendapatan, Mendagri mendorong kreativitas Pemda guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan keberhasilan Kota Pekanbaru yang mampu mengoptimalkan PAD dari Rp800 miliar menjadi lebih dari Rp1 triliun melalui kemudahan perizinan.

Ia juga memaparkan contoh lain seperti Kabupaten Banyuwangi yang berhasil menghubungkan pajak

restoran dan hotel langsung ke Pemda hingga berdampak pada PAD.

Mendagri juga mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjadi instrumen peningkatan PAD. Selain upaya tersebut, ia memastikan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widiantini serta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Hasilnya, pertemuan yang dilakukan pada awal Mei tersebut mendorong masa transisi penerapan UU HKPD untuk diperpanjang selama satu tahun lagi.

"Bukan melalui revisi UU HKPD, tapi dimasukkan ke UU APBN 2027, diperpanjang satu tahun. Sesuai asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori, aturan yang terakhir mengalahkan aturan yang sebelumnya," tutur Mendagri.

■ Sammy



PENGUMUMAN PENDISTRIBUSIAN DIVIDEN TUNAI PT MULTISTRADA ARAH SARANA ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, 30 April 2026, Perseroan telah menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- Jumlah Dividen:** Perseroan menetapkan pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham sebesar USD 100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat).
- Nilai Per Saham:** Dividen yang akan dibagikan adalah sebesar USD 0,0109 (nol koma nol satu nol sembilan Dolar Amerika Serikat) per saham.
- Sumber Dana Dividen:** Dividen tunai tersebut berasal dari:
 - Sisa laba bersih tahun buku 2025 sebesar USD 25.619.010 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu sepuluh Dolar Amerika Serikat).
 - Laba ditahan Perseroan sebesar USD 74.380.990 (tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh Dolar Amerika Serikat).
- Jadwal Pembayaran:** Distribusi Dividen tunai akan didistribusikan kepada para pemegang saham selambat-lambatnya pada bulan Juli 2026. Tata cara teknis pembagian dividen akan diatur lebih lanjut oleh Direksi Perseroan.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham dalam bentuk warkat, pembayaran dividen akan difasilitasi melalui Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan. Sehubungan dengan itu, Pemegang Saham warkat agar menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat dan mengonfirmasi:

- Nama Pemegang Saham;
- Alamat; dan
- Nomor rekening bank, Nama dan cabang bank, atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan, untuk keperluan pembayaran dividen,

dengan melampirkan fotokopi e-KTP yang sesuai dengan alamat sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan fotocopy buku Tabungan halaman depan (halaman yang ada nama pemegang saham).

Surat pernyataan beserta lampirannya dikirimkan kepada PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel. (021) 2525666, selambat-lambatnya pada 25 Juni 2026. Apabila dokumen diterima setelah batas waktu tersebut, pembayaran dividen akan diproses setelah Perseroan/BAE menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen dimaksud.

Jakarta, 9 Juni 2026
PT Multistrada Arah Sarana
Direksi

PENGUMUMAN

Memperhatikan ketentuan pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan ini diberitahukan bahwa akan dilakukan penjualan di bawah tangan, berupa:

SHM No. 273 atas nama AHMAD FIRDAUS dengan luas tanah 262 m² terletak di Perumahan Alvia Pondok Sawah Indah, Jl. Murai 1 Blok Q No. 11 dan 12 RT. 006, RW. 001 Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten.

Apabila terdapat pihak yang berminat atau merasa keberatan atau berkepentingan terhadap penjualan di bawah tangan agunan objek tersebut di atas dapat menghubungi:
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Regional Special Asset Management IV / Jakarta 2, selaku Pemegang Hak Tanggungan, di alamat Wisma Mandiri 2 Lt. 10 Jl. Kebon Sirih No. 83, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- Sdr. Ahmad Firdaus, selaku Pember Hak Tanggungan di Jl. Kota Bambu Selatan No. 01, RT. 012, RW. 005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat;

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterbitkannya pengumuman ini
(Ahmad Firdaus)